

SINOPSIS

Masalah kemiskinan merupakan permasalahan yang telah lama terjadi di Indonesia. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan tersebut, pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijakan. Namun demikian walaupun telah banyak program pemerintah yang dicanangkan untuk memberantas kemiskinan, tetapi tetap saja masih banyak masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Terlebih lagi pada akhir tahun 2005, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) membuat jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan memberikan kompensasi kenaikan harga BBM kepada masyarakat yang dianggap memenuhi syarat kemiskinan sebesar Rp. 300.000 setiap tiga bulan yang disebut Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM). Namun dalam pelaksanaannya, program tersebut masih mengalami kekisruhan. Banyak Kartu Kompensasi BBM salah sasaran yang diakibatkan oleh kekeliruan dalam pendataan keluarga miskin. Berdasarkan kondisi tersebut, maka penyusun merumuskan permasalahan "Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Kompensasi Pengurangan Bahan Bakar Minyak Bagi Masyarakat?".

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan tentang Implementasi Kebijakan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) bagi masyarakat. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Saketi, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten yang menerima dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM), yaitu sejumlah 20 responden. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi, interview dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa masyarakat masih belum memahami kriteria penduduk miskin yang memperoleh dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) sehingga masih ada kekeliruan dalam pendataan masyarakat miskin. Dengan adanya kekeliruan dalam pendataan keluarga miskin tersebut menyebabkan terdapat masyarakat yang secara ekonomi mampu tetapi menerima dana PKPS-BBM. Dalam melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan, masyarakat tidak mengalami kendala karena sudah ada petugas yang menanganinya sehingga masyarakat hanya menerima kartu yang digunakan untuk mengambil dana di kantor desa setempat yang dilakukan oleh petugas dari kantor pos yang telah ditetapkan. Masyarakat dalam menerima dana PKPS-BBM sudah sebanyak 3 kali namun ada juga masyarakat yang menerima hanya 1 - 2 kali. Dana PKPS-BBM yang diterima oleh masyarakat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dari hasil penelitian di atas, maka penyusun menyarankan agar dilakukan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa setempat mengenai kriteria rumah tangga miskin yang menerima dana PKPS-BBM. Dengan demikian program PKPS-BBM sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.